

**DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI ATAS PENGELOLAAN KARGO DAN
POS PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SULTAN HASANUDDIN – MAKASSAR
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-L/2016)**

INTISARI

Oleh :

Bintari Ariyani¹ dan Ningrum Natasya Sirait²

Pengelolaan terminal kargo dan pos di Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan didasarkan pada penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai induk perusahaan. Penunjukan langsung yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur terkait Sinergi BUMN. Pengelolaan kargo yang dilakukan PT Angkasa Pura Logistik dinilai telah melanggar Pasal 17 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mencari tau kesesuaian pengelolaan kargo oleh PT Angkasa Pura Logistik terhadap Undang – Undang Penerbangan.

Penelitian menggunakan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dari bahanm – bahan hukum, mengkaji peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penerbangan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta sinergi BUMN.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus ini bukan merupakan masalah persaingan melainkan legalitas penunjukan langsung yang diberikan kepada PT Angkasa Pura Logistik untuk mengelola terminal kargo di Bandar Udara Sultan Hasanuddin – Makassar.

Kata Kunci : BUMN, Penunjukan Langsung, Terminal Kargo, Sinergi BUMN

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

² Dosen Pembimbing Program S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

MONOPOLY PRACTICE ON CARGO AND POS MANAGEMENT IN SULTAN HASANUDDIN INTERNATIONAL AIRPORT MAKASSAR

(CASE STUDY KPPU VERDICT NUMBER 08 / KPPU-L / 2016)

ABSTRACT

By :

Bintari Ariyani¹ dan Ningrum Natasya Sirait²

The operation of cargo and post terminals at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar is carried out by PT Angkasa Pura Logistik as a subsidiary based on direct appointments made by PT Angkasa Pura I (Persero) as the parent company. Direct appointment made by PT Angkasa Pura I (Persero) based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises that regulates the BUMN Synergy. Cargo management carried out by PT Angkasa Pura Logistik is considered to have violated Article 17 of Law Number 5 Year 1999 by KPPU. This study aims to analyze the decision whether it is in accordance with applicable regulations, as well as to find out the suitability of cargo operated by PT Angkasa Pura Logistik against the Aviation Law.

The research method is based on normative research that focusing on library research of legal materials, and to review the regulation related to aviation, monopolistic practices and unfair business competition and the synergy of State-Owned Enterprises.

The results of the study concluded that this case was not a competition issue but rather the legality of direct appointment given to PT Angkasa Pura Logistik to operate the cargo terminal at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar.

Keywords : State-Owned Enterprises, Direct Designation, Cargo Terminal, Synergy of State-Owned Enterprise

¹ Master of Law Student, Law Faculty, Gadjah Mada University

² Master of Law Lecturer, Law Faculty, Gadjah Mada University